

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Alif Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.
- Arif Bahtiar, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Arifin P Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformas*, Bhuna Ilmu Komputer, Jakarta, 2008.
- Juli Panglima Siragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia, Jakarta, 2003..
- M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Muhammad Djafar Saidi, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana Jakarta, 1981.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- R.D.H Koesomaatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung, 1979.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990.

Sarman & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad le-20*, Alumni, Bandung.

Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif di Daerah*, Mandar Maju, Jakarta, 2007.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006.

Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  
Daerah

Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun  
Anggaran 2015

Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun  
Anggaran 2016

### C. Sumber Lain

Nia.K.Winayanti. *Hand-out Pengertian Keuangan Negara* FH Unpas, Bandung, 2015.

SUSANTO, Anthon Freddy; Gialdah Tapiansari. PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF PARTISIPATORIS: SEBUAH GAGASAN DAN KONSEP AWAL LITIGASI, [S.I.], v. 17, n. 2, p. 3314-3376, nov. 2016. ISSN 2442-2274. Available at: <http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159>. Date accessed: 28 jan. 2017.

[www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)